

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Meutia (2004:136) mendefinisikan Kualitas Audit adalah sebagai berikut:

“Audit sebagai suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan”.

Menurut Natalie dan Astika (2016:138) mendefinisikan kualitas Audit adalah sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah sebagai suatu tolak ukur yang menunjukkan kualitas hasil audit yang dapat di proksikan dengan besaran suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) dan KAP *Big Four* sebagai proksi kualitas auditor yang tinggi”.

Menurut De Angelo dalam Saripudin, Netty, Rahayu (2012:89):

“Bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*KAP big-4*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*KAP non big-4*)”.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas audit merupakan kemampuan seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien agar dapat menghasilkan hasil audit

yang berkualitas serta dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi didalam laporan keuangan tersebut.

Pentingnya pengawasan auditor bagi perusahaan menjadikan kualitas auditor bagi kualitas audit menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Terlihat dari kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan perusahaan yang menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar yaitu *Big Four* biasanya adalah auditor yang berkualitas dan memiliki reputasi yang baik dimata publik, sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang tinggi juga akan mempengaruhi besarnya risiko terungkapnya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Non Big Four* sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan manajemen.

2.1.1.1 Indikator Kualitas Audit

Menurut De Angelo dalam Saripudin,Netty,Rahayu (2012) kualitas Audit menyatakan bahwa :

“Variabel ini di ukur dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan menggunakan variabel *dummy*. Kode 1diberikan apabila KAP berafisiliasi dengan KAP *Big Four*, dan kode 0 diberikan apabila KAP yang tidak berafisiliasi dengan KAP *Big Four*”.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit

1. Pengalaman kerja.

Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini

dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis Martini (2011). Penelitian Choo dan Trotman (2001) dalam Batubara (2010) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum (*atypical*) dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman.

2. Independensi

Menurut Supriyono (1988), pentingnya independensi bagi seorang auditor adalah (1) independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajiban informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi, (2) independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan, (3) independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, (4) jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai, (5) independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel.

3. Obyektifitas

Obyektifitas bagi auditor sektor publik diatur dalam kode etik APIP yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP. Obyektifitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor. Prinsip perilaku obyektifitas berbunyi: “Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.” Obyektifitas auditor sektor publik wajib dijaga agar tidak terjadi negosiasi hasil audit yang dapat merugikan masyarakat. Kebijakan menjaga obyektifitas dapat dituangkan dalam bentuk ketentuan seperti: tidak diperkenankannya seorang auditor sektor publik melakukan audit pada auditi tertentu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukannya rotasi atau mutasi penugasan audit, larangan seorang auditor melakukan audit pada auditi yang pejabatnya memiliki hubungan keluarga, dan sebagainya.

4. Integritas

Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Auditor yang tinggi integritasnya adalah yang dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja atau yang disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan

bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Semakin tinggi integritas auditor dalam penugasan audit maka akan meningkatkan kualitas hasil audit.

Integritas merupakan perwujudan dari kejujuran auditor dalam melakukan penugasan profesionalnya. Dengan kejujuran dalam mengungkapkan temuan audit maka kualitas hasil pemeriksaan akan terjaga. Bagi auditor sector publik, penugasannya akan membawa konsekuensi hukum karena obyek auditnya adalah penggunaan keuangan negara yang rentan terhadap korupsi. Dalam pengungkapan temuan kasus-kasus korupsi diperlukan adanya kejujuran (integritas) para auditornya sehingga pengungkapan kasusnya akan menjadi transparan dan menjaga rasa keadilan pada masyarakat.

Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa auditor sektor publik harus selalu memegang teguh prinsip integritas yang mengharuskannya untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan publik dan dasar pengambilan keputusan yang andal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maburi dkk (2010).

5. Kompetensi

Kompetensi auditor sektor publik diatur dalam kode etik APIP yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP. Prinsip kompetensi menekankan auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian,

pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Perilaku kompetensi auditor sektor publik antara lain; tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit; selalu meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

2.1.2 Manajemen Laba

2.1.2.1 Pengertian manajemen laba

Menurut Yura (2015:88) mendefinisikan manajemen laba adalah sebagai berikut :

“Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan kepentingan pelaksanaan manajemen laba tersebut”.

Menurut Sulistyanto (2014:48) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Perbuatan curang yang melanggar prinsip akuntansi, upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan metode dan standar akuntansi yang ada untuk mengelabui pemakai laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan seperti menaikkan turunkan laba tujuannya untuk kesejahteraan pihak tertentu dalam waktu yang cukup lama selama pihak luar tidak mengetahui laba tersebut dimanipulasi turunkan dan bisa juga untuk kepentingan perusahaan agar terlihat bagus laporan keuangan tujuannya untuk menarik investor.

2.1.2.2 Indikator Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2014:225) manajemen laba menyatakan bahwa:

“Manajemen laba pada penelitian ini menggunakan model jones dimodifikasi (*Modified Jones*) dimana model ini menggunakan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba dan model ini dinilai model yang paling baik dan mendeteksi manajemen laba”.

Total akrual diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary* dan *non discretionary* dengan tahapan:

Mengukur total *accrual* dengan menggunakan Model Jones yang di modifikasi.

$$\text{Total Accrual (TAC)}_{it} = \text{Net Income (NI)}_{it} - \text{Arus Kas Operasi (CFO)}_{it}$$

Sumber: Agustia (2013)

2.1.2.3 Tujuan dan Motivasi manajemen laba

Menurut Scout (2003:383) menyatakan bahwa tujuan dan motivasi laba adalah sebagai berikut :

- “ a. Bonus Purpose (Tujuan Purpose)
Manajer perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.
- b. Taxation Motivation (Motivasi Perpajakan)
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan perusahaan.
- c. Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pension akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus manajemen dan apabila kinerja perusahaan buruk mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
- d. *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Saham Perdana
Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public tersebut melakukan manajemen laba dengan harapan bisa menaikkan harga saham perusahaan”.

2.1.3 Leverage

2.1.3.1 Pengertian Leverage

Setiap perusahaan harus memiliki *leverage* atau rasio total hutang untuk memanaj hutang yang ada dalam perusahaan agar laba yang ada dalam perusahaan baik aset dan aset perusahaan bertambah.

Menurut Veliandiana (2013:44) mendefinisikan *Leverage* adalah sebagai berikut :

“Financial *leverage* merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang memiliki hutang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian hutang jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki hutang lebih kecil”.

Menurut Mardiyah (2005:36) mendefinisikan *leverage* adalah sebagai berikut :

“Perusahaan yang melanggar hutang secara potensial menghadapi berbagai kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat bunga, dan negosiasi ulang masa hutang”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan *leverage* yaitu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memiliki hutang. Karena dengan menggunakan rasio *leverage* kita dapat memantau seberapa besar hutang perusahaan karena pada dasarnya seberapa besar beban utang yang ditanggung akan perusahaan dibandingkan dengan aktivitya. *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan proksi *debt price Ratio* (DPR).

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi *Leverage*

Menurut Sujarweni (2017:56) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *leverage*, yaitu sebagai berikut:

“ a. Tingkat pertumbuhan penjualan masa depan merupakan ukuran sampai sejauh mana laba per saham dari suatu perusahaan yang dapat ditingkatkan oleh *leverage*. Jika penjualan dan laba meningkat, pembiayaan dengan hutang dengan beban tertentu akan meningkatkan pendapatan pem bilik saham.

b. Stabilitas arus kas

Bila stabilitas penjualan dan laba lebih besar, maka beban hutang tetap yang terjadi pada perusahaan akan mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menjual dan labanya menurun.

c. Karakteristik Industri

Kemampuan untuk membayar hutang tergantung pada profitabilitas dan juga volume penjualan. Dengan demikian stabilitas laba adalah sama pentingnya dengan stabilitas penjualan.

d. Struktur aktiva

Struktur aktiva mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan melalui beberapa cara. Perusahaan yang mempunyai aktiva tetap jangka panjang, terutama jika permintaan akan produk cukup meyakinkan, akan banyak menggunakan hutang hipotek jangka panjang. Perusahaan yang sebagian aktivaanya berupa piutang dan persediaan barang tidak begitu tergantung pada pembiayaan jangka pendek.

e. Sikap manajemen

Sikap manajemen yang paling ditentukan dalam memilih cara pembiayaan adalah sikapnya terhadap pengendalian dan resiko. Perusahaan besar yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang akan memilih penambahan penjualan saham biasa karena penjualan ini tidak banyak mempengaruhi pengendalian perusahaan. Sebaliknya, pemilik perusahaan kecil mungkin lebih sering menghindari penerbitan saham biasa salam usahanya untuk tetap mengendalikan perusahaan sepenuhnya karena mereka biasanya sangat yakin terhadap prospek perusahaan mereka dan karena mereka dapat melihat laba lebih besar yang akan menerima peroleh”.

2.1.3.3 Indikator Leverage

Menurut Kasmir (2015:158) *Leverage* menyatakan bahwa:

“Rasio ini menggunakan utang dan modal untuk mengukur besarnya rasio utang yang di maksudkan. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digunakan oleh modal Rasio ini dihitung dari rumus”.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Firdaus dan Fakhry (2018:76) mengemukakan bahwa :

“Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan suatu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel. Sebagai rangkaian penalaran berdasarkan premis-premis teori yang relevan hingga menuju simpulan dan berakhir pada hipotesis yang akan diuji secara empiris”.

2.2.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba

Menurut Solatiah (2014:24) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit yang tinggi adalah ketika auditor mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dari Laporan Keuangan mengenai hal-hal yang memang tidak seharusnya terdapat pada Laporan Keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan audit yang mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa adanya salah saji material atau kecurangan lainnya, sehingga hal ini membuat kegiatan praktik menaikkan laba dapat berkurang atau dengan kata lain menurun”.

Menurut Herusetya (2009:60) yang menemukan bahwa :

“Semakin tinggi kualitas audit yang menggunakan ukuran KAP (*KAP The Big- 4*) maka semakin rendah manajemen laba yang terjadi di perusahaan tersebut”.

Menurut Pambudi dan Sumantri (2012), Nuraini dan Zain (2007) yang menyatakan bahwa:

“Kualitas audit ditentukan negatif terhadap manajemen laba. Hal ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit semakin rendah pula tindakan manajemen laba yang dapat dicegah, karena kemampuan auditor KAP *Big four* lebih baik mendeteksi potensi kecurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah terjadinya manajemen laba di dalam perusahaan”.

Kualitas audit di proksikan dengan KAP dari *Big Four* yaitu: memberikan kualitas tinggi dapat mencegah berlaku curang dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang tidak relevan, sedangkan KAP *Non Big Four* lebih rendah dalam menghambat praktik manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Menurut Sartono (2008:47) mengatakan bahwa:

“Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar terhindar dari adanya penurunan pinjaman dari pihak luar. Tetapi hal tersebut disanggah karena Besarnya tingkat hutang perusahaan (*leverage*) dapat ditentukan tindakan manajemen laba”.

Menurut Husnan (2001:155) menyatakan bahwa :

“*Leverage* yang tinggi yang disebabkan kesalahan 48 manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Jika tingkat kewajiban yang tinggi menjadikan pihak manajemen perusahaan menjadi lebih sulit dalam membuat prediksi jalannya perusahaan kedepan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *leverage* menjadi salah satu faktor yang ditentukan terhadap praktik manajemen laba karena semakin tinggi hutang perusahaan semakin banyak kesempatan perusahaan melakukan praktik manajemen laba”.

Menurut Subhan (2011:119) mendefinisikan *Leverage* adalah sebagai berikut :

“*Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Dengan semakin banyaknya hutang maka manajemen harus dapat

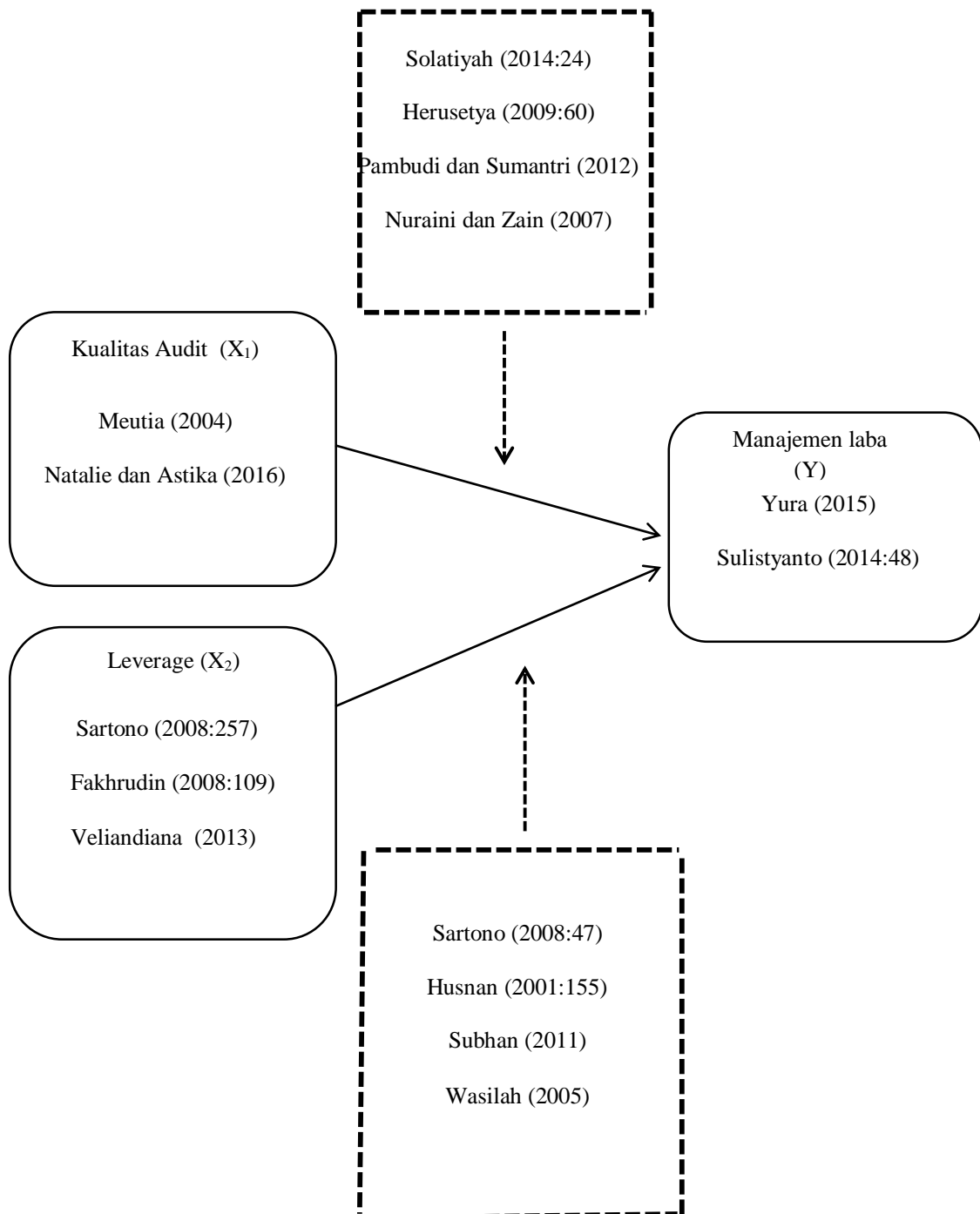
lebih meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan tetap dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. *Leverage* yang tinggi akan berpengaruh dengan nilai pembiayaan yang juga tinggi dengan maksud untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang, dengan mempertahankan kinerja perusahaan tersebut, diharapkan kreditur juga akan tetap memiliki kepercayaan terhadap manajemen perusahaan”.

Menurut Wasilah (2005) yang menyatakan bahwa:

“Rasio hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi, maka manajemen menggunakan resiko yang tidak dalam bentuk rekayasa laba karena adanya pengawasan yang insentif dari kreditur. Ketika resiko perusahaan tinggi yang diukur dengan rasio hutang yang tinggi, maka manajemen berusaha untuk menurunkan resiko persepsian bagi kreditur dengan cara menyajikan laporan laba yang relatif lebih stabil, artinya manajer tidak melakukan manajemen laba”.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Paradigma Pemikiran Penentu Kualitas Audit dan *Leverage* pada Manajemen Laba

2.3 Hipotesis

Menurut Dantes (2012:164) mengatakan bahwa :

“Hipotesis sebagai praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang di peroleh dengan jalan penelitian”.

Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kualitas Audit Menentukan Manajemen Laba.

H₂: *Leverage* Menentukan Manajemen Laba.